

ANALISA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017

Hary Sastryawanto

sas_hary@yahoo.co.id

Dosen pada Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah Analisa SDG's Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017. Tujuan Penelitian ini adalah 1) mengetahui posisi capaian awal pembangunan berkelanjutan/SDG's Kabupaten Bojonegoro; 2) mendorong para pemangku kepentingan dalam menyediakan data dan informasi bagi ketersediaan indikator SDGs di Kabupaten Bojonegoro; 3) sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro (khususnya Perangkat Daerah terkait) dalam melakukan penyiapan program dan kegiatan yang terkait pencapaian indikator- indikator SDG's di Kabupaten Bojonegoro.

Metode dalam analisa SDG's ini secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama (Pendahuluan) menyajikan latar belakang, perlunya memotret kondisi awal SDG's, indikator-indikator SDG's untuk level penyajian tingkat Kabupaten/Kita. Bagian kedua menyajikan analisis tentang potret awal pembangunan berkelanjutan berdasarkan ketersediaan indikator di masing-masing tujuan dan target. Bagian ketiga sebagai penutup menyajikan sejauh mana kesiapan daerah dalam implementasi TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Hasil penelitian ini yaitu berupa perencanaan sebagai berikut :1) Dalam hal kelembagaan, akan segera membentuk kelembagaan khusus berikut unit kerja tertentu (sesuai pilar TPB/SDG's) yang akan menangani TPB/SDG's, termasuk penyediaan sekretariat TPB/SDG's Kabupaten Bojonegoro. Untuk sementara waktu (sambil menunggu terbentuknya kelembagaan dimaksud), Bappeda, Bidang Sosial Budaya memerankan diri sebagai koordinator dalam persiapan pelaksanaan awal TPB/SDG's; 2) Secepatnya (tahun 2018) segera menyusun Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Renaksi TPB) Kabupaten Bojonegoro untuk Tahun 2018-2022 dengan terlebih dahulu membentuk lembaga pengorganisasian penyusunan Renaksi TPB sebagaimana pedoman penyusunan Renaksi TPB/SDG's; 3) Mengembangkan sistem "One Data" yang dikelola oleh Bappeda atau Pokja khusus yang akan dibentuk untuk menangani pengelolaan data dalam rangka optimalisasi pelaksanaan TPB/SDG's khususnya dalam hal pengelolaan data dan indikator TPB/SDG's. OPD bertanggungjawab terhadap data sektoral, sementara untuk data makro menjadi tanggung- jawab Bappeda atau Pokja khusus yang akan dibentuk untuk menangani pengelolaan data. 4) Lebih mengintensifkan koordinasi antar stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan TPB/SDG's dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program serta monitoring implementasi TPB/SDG's, disamping itu juga untuk melakukan penguatan peran

masing-masing pihak; 5) Menerbitkan regulasi (peraturan daerah maupun peraturan Bupati) yang secara tegas dan spesifik tentang implementasi TPB/SDG's di Kabupaten Bojonegoro.

Kata kunci: SDG's, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Sistem One Data.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Millennium Development Goals (SDG's) merupakan deklarasi millenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara yang berupa delapan tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Sejak disepakatinya pada bulan September 2000, SDG's telah menjadi suatu paradigma pembangunan hampir seluruh negara-negara di dunia. Walaupun tujuan dan target SDG's tidak mengikat secara hukum, namun banyak negara-negara tetap memantau pencapaiannya melalui beberapa indikator pencapaian di negaranya masing-masing. Hal ini menunjukkan komitmen masyarakat global, termasuk Pemerintah Indonesia terhadap pelaksanaan SDG's.

Banyak pihak yang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SDG's yang telah diimplementasikan selama empat belas tahun di seluruh dunia. Walaupun masih banyak hal yang belum dicapai, namun perlu diakui bahwa selama ini SDG's sudah membawa perubahan besar di dunia. SDG's telah menjadi saksi sejarah proses pengurangan kemiskinan terbesar dalam sejarah manusia. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional, yaitu \$1,25 per hari, sudah berkurang setengah milyar. Laju kematian anak turun lebih dari 30 persen, dengan sekitar tiga juta jiwa anak terselamatkan setiap tahunnya dibandingkan tahun 2000. Kematian akibat malaria juga turun hingga seperempatnya (PBB, 2013).

Di Indonesia, pelaksanaan SDG's telah memberikan perubahan yang positif. Walaupun masih banyak hal yang belum dicapai, namun perlu diakui bahwa selama ini SDG's sudah membawa perubahan besar di Indonesia. SDG's telah menjadi saksi sejarah proses pengurangan kemiskinan terbesar dalam sejarah manusia. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, sudah berkurang dari 18,20 persen pada tahun 2002 menjadi 11,13 persen pada tahun 2015. Sekitar 70 persen dari total indikator yang mengukur target SDG's telah berhasil dicapai oleh Indonesia. Akan tetapi, beberapa indikator yang mengukur target di bidang kesehatan masih cukup jauh dari capaian dan harus mendapatkan perhatian khusus. Target yang belum tercapai di antaranya adalah tingkat kemiskinan nasional. Angka kematian bayi, angka kematian ibu, prevalensi gizi buruk, prevalensi HIV dan AIDS serta beberapa indikator terkait lingkungan.

Sementara itu di Kabupaten Bojonegoro, pelaksanaan SDG's berhasil menurunkan proporsi penduduk miskin dari 28,12 persen pada tahun 2003 menjadi 14,88 persen pada tahun 2016, walaupun masih di bawah Provinsi Jawa Timur maupun nasional tapi sudah on the track. Sekitar 67,65 persen Indikator SDG's dari total indikator yang mengukur target SDG's untuk Kabupaten/Kota telah berhasil di capai oleh Kabupaten Bojonegoro, dan sekitar 17,65 persennya menuju arah pencapaian target.

Setelah melihat perubahan besar karena penerapan MDGs, negara-negara telah memikirkan dan merancang suatu agenda pembangunan baru yang harus disiapkan untuk menggantikan dan meneruskan SDG's. Banyak pihak yang berpendapat bahwa agenda pembangunanyang menetapkan keberlanjutan dan kesetaraan harus lebih diutamakan untuk menjadi agenda pembangunan selanjutnya. Suatu agenda pembangunan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. SDG's (Sustainable Development Goals)menjadi suatu hal yang paling sering dibicarakan untuk dijadikan agenda pembangunan selanjutnya.

Pada tanggal 2 Agustus 2015, sebanyak 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia, secara aklamasi mengadopsi dokumen berjudul "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" (Mengalihrupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan). Dokumen ini kemudian disahkan oleh Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di KTT Pembangunan Berkelanjutan PBB di New York pada 25-27 September 2015. Dokumen tersebut terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dan terbagi menjadi 169 target. Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan pembaharuan tujuan dan indikator target universal dari negara anggota PBB yang akan membingkai setiap agenda dan kebijakan politik negara selama 15 tahun ke depan. Pada dasarnya SDG's akan mengikuti dan memperluas pencapaian SDG's yang telah disetujui sejak tahun 2000 yang akan berakhir di akhir tahun 2015.

Pada tanggal 22 Maret 2016, Bupati Bojonegoro bersama sekitar 500 orang wakil komponen masyarakat termasuk NGO lokal dan tokoh masyarakat serta perwakilan legislatif, juga generasi muda di Kabupaten Bojonegoro telah secara resmi meluncurkan kesatuan tekad sebagai satu- satunya Kabupaten/Kota yang pertama menyatakan siap mengimple- mentasikan SDG's dengan sebaik-baiknya. Dan sebagai tindak lanjutnya, pada tahun ini, Kabupaten Bojonegoro merasa perlu memotret kondisi awal pencapaian indikator-indikator SDG's melalui analisis mendalam dengan harapan agar posisi awal capaian SDG's ini nantinya dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's).

PERMASALAHAN

Permasalahan yang dirumuskan dalam kegiatan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi posisi capaian awal pembangunan berkelanjutan/SDG's Kabupaten Bojonegoro;
2. Seberapa besar peran para pemangku kepentingan dalam menyediakan data dan informasi bagi ketersediaan indikator SDGs di Kabupaten Bojonegoro;
3. Apa upaya yang dilakukan dalam menyiapkan program dan kegiatan yang terkait pencapaian indikator- indikator SDG's di Kabupaten Bojonegoro.

TUJUAN

Penyusunan dokumen analisa SDG's Kabupaten Bojonegoro dimaksudkan untuk memberikan gambaran/potret capaian awal pembangunan berkelanjutan/SDG's di Kabupaten Bojonegoro.

Adapun tujuan penyusunan dokumen analisa SDG's Kabupaten Bojonegoro adalah: mengetahui posisi capaian awal pembangunan berkelanjutan/SDG's Kabupaten Bojonegoro; mendorong para pemangku kepentingan dalam menyediakan data dan informasi bagi ketersediaan indikator SDGs di Kabupaten Bojonegoro; sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro (khususnya Perangkat Daerah terkait) dalam melakukan penyiapan program dan kegiatan yang terkait pencapaian indikator-indikator SDG's di Kabupaten Bojonegoro.

SISTEMATIKA.

Analisa SDG's ini secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama (Pendahuluan) menyajikan latar belakang, perlunya memotret kondisi awal SDG's, indikator-indikator SDG's untuk level penyajian tingkat Kabupaten/Kota.

Bagian kedua menyajikan analisis tentang potret awal pembangunan berkelanjutan berdasarkan ketersediaan indikator di masing-masing tujuan dan target. Bagian ketiga sebagai penutup menyajikan sejauh mana kesiapan daerah dalam implementasi TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

ANALISA SDG'S KABUPATEN BOJONEGORO

Dalam melakukan analisa SDG's ini terdapat beberapa tujuan yang akan diuraikan diantaranya :Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Adil dan Inklusif serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup untuk Semua. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air dan Sanitasi untuk Semua secara Berkelanjutan. Menjamin Akses Terhadap Energi yang Terjangkau, Dapat Diandalkan, Berkelanjutan, dan Modern. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di semua Tingkatan.

KESIAPAN KABUPATEN BOJONEGORO DALAM IMPLEMENTASI SDG'S.

Selain memotret kondisi awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's yang telah dibahas sebelumnya, kiranya perlu juga melihat sekilas persiapan pelaksanaan SDG's di Kabupaten Bojonegoro terkait dengan persiapan pelaksanaan SDG's mencakup (i) pertemuan koordinasi antar stakeholder dan sosialisasi SDG's, (ii) memetakan SDG's dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan (iii) pemetaan ketersediaan indikator SDG's.

Pertemuan Koordinasi antar Stakeholder dan Sosialisasi SDG's;

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang menjadi Lokasi launching SDG's. Untuk menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Kabupaten beserta stakeholder terkait telah beberapa kali mengadakan pertemuan koordinasi untuk membahas persiapan implementasi TPB/SDG's. Terkait dengan persiapan pelaksanaan TPB di Jawa Barat, sosialisasi tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah dilakukan. Sosialisasi diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Bojonegoro dengan nara sumber dari Bapenas, dengan peserta sejumlah SKPD, BPS, akademisi, pengusaha, dan stakeholder lain.

Meskipun demikian, Kabupaten Bojonegoro (dan seluruh Kabupaten/ Kota di Indonesia) hingga saat ini belum menyusun/memiliki dokumen Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Renaksi TPB/ SDG's). Disisi lain, secara khusus belum ada unit yang khusus menjadi koordinator penyelenggaraan dalam pelaksanaan TPB/SDG's di Kabupaten Bojonegoro.

Memetakan SDG's dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Pemetaan awal TPB/SDG's dengan RPJMD Kabupaten Bojonegoro telah dilakukan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bekerja sama dengan instansi terkait telah mencoba melakukan perubahan penyesuaian RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 dengan matriks susunan keterkaitan tujuan TPB/SDG's dengan tujuan, sasaran dan program RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018.

RENCANA KEDEPAN DAN HARAPAN

Dalam implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) ke depan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam hal kelembagaan, akan segera membentuk kelembagaan khusus berikut unit kerja tertentu (sesuai pilar TPB/SDG's) yang akan menangani TPB/SDG's, termasuk penyediaan sekretariat TPB/SDG's Kabupaten Bojonegoro. Untuk sementara waktu (sambil menunggu terbentuknya kelembagaan dimaksud), Bappeda, Bidang Sosial Budaya memerankan diri sebagai koordinator dalam persiapan pelaksanaan awal TPB/SDG's;

Secepatnya (tahun 2018) segera menyusun Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Renaksi TPB) Kabupaten Bojonegoro untuk Tahun 2018-2022 dengan terlebih dahulu membentuk lembaga pengorganisasian penyusunan Renaksi TPB sebagaimana pedoman penyusunan Renaksi TPB/SDG's;

Mengembangkan sistem “One Data” yang dikelola oleh Bappeda atau Pokja khusus yang akan dibentuk untuk menangani pengelolaan data dalam rangka optimalisasi pelaksanaan TPB/SDG’s khususnya dalam hal pengelolaan data dan indikator TPB/SDG’s. OPD bertanggungjawab terhadap data sektoral, sementara untuk data makro menjadi tanggung-jawab Bappeda atau Pokja khusus yang akan dibentuk untuk menangani pengelolaan data.

Lebih mengintensifkan koordinasi antar stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan TPB/SDG’s dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program serta monitoring implementasi TPB/SDG’s, disamping itu juga untuk melakukan penguatan peran masing-masing pihak;

Menerbitkan regulasi (peraturan daerah maupun peraturan Bupati) yang secara tegas dan spesifik tentang implementasi TPB/SDG’s di Kabupaten Bojonegoro.

Beberapa harapan terkait dengan implementasi TPB/SDG’s adalah adanya kejelasan konsep definisi yang mudah dipahami oleh daerah mengenai indikator yang sudah ditetapkan serta diberikan penjelasan pengumpulan indikatornya dan penghitungannya. Selain itu, pada tahun 2018, diharapkan indikator TPB/SDG’s dan Peraturan Presiden tentang TPB/SDG’s telah ditetapkan sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun secara penuh Renaksi TPB/SDG’s serta pembahasan lebih intensif dengan OPD dan BPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2011, *Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2014, *Kajian Indikator Lintas Sektor – Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2016, *Indikator Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2016, *Kajian Indikator Lintas Sektor – Potret Awal Indikator Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, *Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015 – 2019*. Jakarta: Bappenas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017, (draft Final) *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah untuk Tujuan Pembangunan berkelanjutan*. Jakarta: Bappenas.